

BAB VI

ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN PKB DAN PESANTREN DI LAMPUNG

Pengenalan

Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pesantren di Lampung menggambarkan sebuah pola yang memang membutuhkan analisis terhadapnya. Meski pola yang muncul secara umum dapat dibaca sebagai hubungan yang simbiotik, tetapi dalam beberapa momen, relasi itu berjalan naik turun dan dinamis. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa dinamika itu terjadi. Tetapi juga tidak boleh dilupakan bahwa Provinsi Lampung merupakan wilayah yang konsisten dilihat dari sumbangan suara untuk menjadikan orang tempatan sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Analisis dalam bagian ini akan diawali dengan menjadikan fungsi partai politik sebagai perspektif dalam melihat peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung. Apakah empat fungsi partai politik seperti disinggung Neumann dimanifestasikan secara holistik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau tidak. Selain melihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari perspektif fungsi partai politik, bab ini juga hendak mencermati tantangan yang dihadapi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai sebuah partai politik berdasarkan sejarah keikutsertaan parti ini dalam pelbagai momen pilihan raya umum (PEMILU). Di bagian akhir, bab ini akan menyinggung tentang bagaimana di pilihan raya umum 2014, Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) mampu kembali menunjukkan kualitasnya sebagai partai besar di Indonesia. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut.

Analisis Peran PKB dengan Perspektif Fungsi Partai Politik

Kajian tentang partai politik di Indonesia memang cukup pelbagai dengan mengambil banyak sisi sebagai objeknya. Imdadun Rakhmat menganalisis fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari aspek ideologi politiknya.¹ Dengan objek yang sama, Burhanuddin Muhtadi melihat PKS dari sisi gerakan sosial. Dari perspektif gerakan sosial, Burhan melihat PKS (i) hadir dari kondisi sosial politik dan kemudian menciptakan struktur kesempatan politik yang memungkinkan timbulnya gerakan (ii) memanfaatkan kondisi itu dengan melakukan konsolidasi dan peningkatan kapasitas organisasi dan memperluas jaringan (iii) menanggapi terbukanya peluang politik dengan mengkonsolidasikan ahli atau kader dan simpatisan gerakan yang memiliki ideologi, gagasan dan pemahaman yang sama.²

Kajian lain tentang partai politik dilakukan oleh Effendy Choirie terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ia bandingkan dengan fenomena *United Malays National Organization* (UMNO) di Malaysia.³ Dengan mencermati pandangan keduanya tentang nasionalisme atau kebangsaan, Choirie menuturkan bahawa keduanya ada dalam konteks yang berbeza, sejarah bangsa yang berlainan, sehingga artikulasi politiknya juga tidak sama. Yang menyamakannya ialah kerana

¹ M. Imdadun Rakhmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Jogjakarta: LKiS, 2008.

² Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, hlm. 255.

³ A Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*, Jakarta: Pensil 324, 2008, hlm. 307-308.

keduanya berupaya untuk menggabungkan aspirasi Islam dan kebangsaan dalam falsafah dan orientasi perjuangannya.

Perbezaan artikulasi politik UMNO di Malaysia dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Indonesia, terang Choirie itu salah satunya disebabkan oleh sejarah panjang perjalanan Islam di kedua negara tersebut. Islam di Indonesia beza dengan Malaysia.⁴ Di era kekuasaan kolonial, Islam diberikan ruang gerak yang sangat luas sehingga menjadi sistem simbolik tunggal. Sementara di Indonesia, kekuatan Islam sangat dihadkan oleh pemerintah Belanda. Mereka memberi ruang pada Islam ibadah tapi menekan Islam politik. Latar belakang ini menunjukkan bahawa di Indonesia, Islam tidak pernah menjadi kekuatan tunggal yang memayungi semua warga negara Indonesia. Sementara pemerintah kolonial Inggris di Malaysia memilih untuk tidak turut campur dalam urusan adat dan agama, serta membiarkan Islam sebagai kekuatan konservatif. Dalam situasi seperti inilah kehadiran idea tentang Islam dan Kebangsaan dari PKB dan UMNO harus ditempatkan.⁵

Agak mundur ke belakang, kajian tentang Golongan Karya (Golkar) pada tahun 1971-1983 dilakukan oleh David Reeve.⁶ Reeve menulis tentang sejarah serta akar pemikiran Golkar dan kekuatan tunggal di era orde baru dengan sokongan penuh dari militer, birokrasi dan kekuatan korporatis-fungsional di sekelilingnya. Tulisan Andre Feillard membahas dinamika Nahdlatul Ulama (NU) organisasi masyarakat yang kemudian menjadi parti politik dan menjadi pemenang ketiga

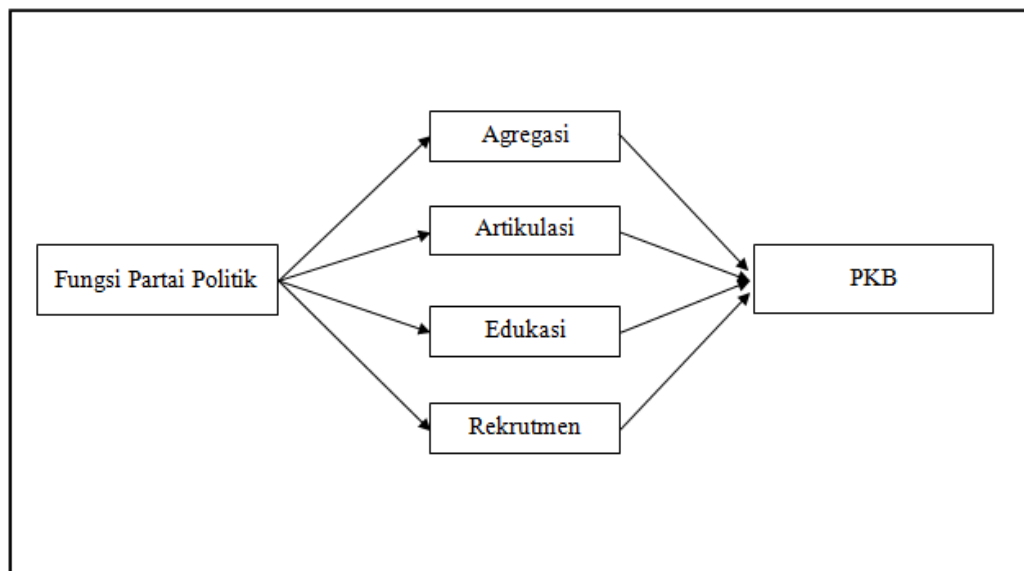
⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika*, Depok: Komunitas Bambu, 2013.

dalam pilihan raya umum tahun 1955.⁷ Valina Singka Subekti menelaah tentang konflik, kekuasaan elit dan kontestasi politik dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).⁸ Kajian Partai Komunis Indonesia (PKI) periode awal dilakukan dengan baik oleh Ruth T. McVey.⁹

Kajian yang penulis lakukan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai parti politik berbeza dengan telaah-telaah yang dikerjakan sebelumnya.¹⁰ Fokus penelitian ini melihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari sisi fungsinya sebagai parti politik. Fungsi ini kemudian dibatasi pada komuniti yang spesifik, iaitu pesantren. Alur analisis fungsi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pesantren dengan menjadikan Lampung sebagai lokasinya, dapat dilihat dalam skema singkat pada Rajah 5.1.



Rajah 5.1: Fungsi Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

⁷ Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

⁸ Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

⁹ Ruth T. McVey, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2010.

¹⁰ Misalnya dengan yang sudah dikaji oleh A Effendy Choirie, *Islam-Nasionalism*

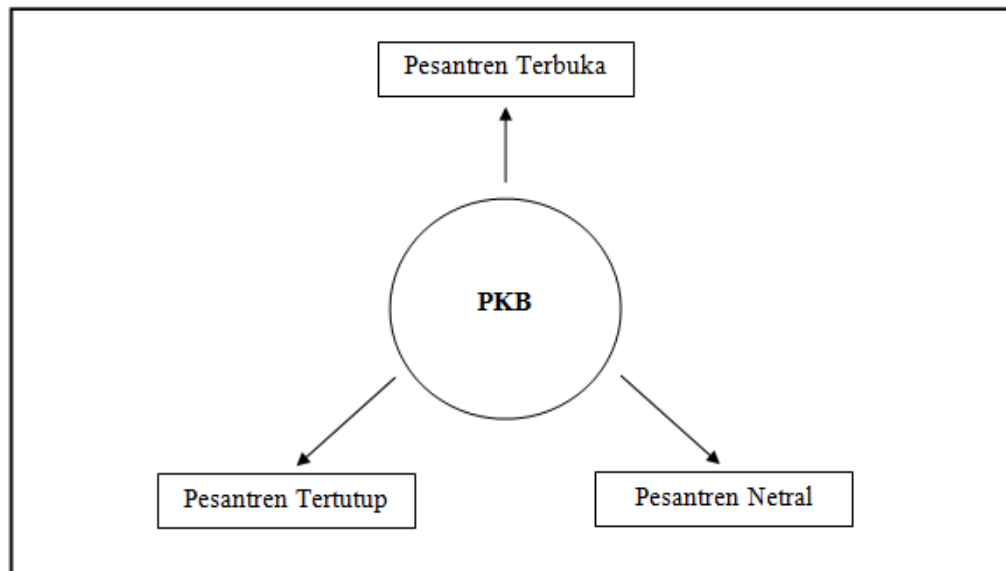
Fungsi agregasi dari parti politik menggambarkan tentang upaya penggabungan oleh parti dan mengarahkan kehendak umum masyarakat dalam situasi yang tidak teratur. Sementara fungsi pendidikan dimaksudkan agar masyarakat memahami politik dan mempunyai kesedaran politik berdasarkan ideologi parti. Fungsi artikulasi dimaksudkan untuk menyuarakan (mengartikulasikan) pelbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (*public policy*). Yang terakhir ialah fungsi perekrutan. Ini bererti parti melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam erti mendudukkan ahli atau kader parti ke dalam parlimen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi mahupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, mahupun rekrutmen parti dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi ahli baru ke dalam partai.¹¹ Di luar empat fungsi yang dirumuskan Neumann, penulis mencoba mengklasifikasikan fungsi parti politik berdasarkan tiga isu besar; politik, sosial dan ekonomi seperti penjabaran di tiga bab terdahulu.

Kerana sifatnya sebagai parti politik, maka penggambaran fungsi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam konteks domain isu, lebih banyak dimainkan di dua area, iaitu dalam konteks fungsi sosial dan fungsi politiknya. Sementara dalam domain ekonomi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang tidak menjalankan perannya secara langsung.¹² Peran maksimal yang dapat dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ialah mengawal peruntukan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi untuk pesantren. Dengan begitu, Partai Kebangkitan Bangsa

¹¹ Harry Eickstein dan David E. Apter, *Comparative Politics*, London: The Free of Gloence, 1963, hlm. 352.

¹² Temu Bual Musa Zainuddin, Okta Rijaya dan Amin Thohari.

(PKB) tidak menyediakan anggaran langsung berupa uang tunai untuk pesantren sebagai manifestasi dari fungsi ekonominya.



Rajah 6.2: Jenis Sokongan Terhadap Parti Politik

Dalam menjalankan fungsinya sebagai parti politik serta korelasinya dengan pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memerankan fungsi sesuai dengan pola sokongan yang diberikan oleh pesantren tersebut terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pesantren yang menyokong secara terbuka misalnya, tentu sahaja berbeza dengan perannya terhadap pesantren yang neutral politik.¹³

Empat fungsi parti politik dimainkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada pesantren yang menyokong secara terbuka. Fungsi agregasi begitu sangat terlihat terutama pada masa-masa awal reformasi. Situasi dimana stabiliti politik

¹³ Temu Bual Musa Zainuddin.

belum tercipta, maka salah satu saluran politik yang dapat diharapkan memainkan peran oleh dunia pesantren adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kepentingan pesantren yang selama orde baru tidak banyak difasilitasi pemerintah, diagregasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Fungsi agregasi ini juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pesantren yang menyokong secara tertutup atau pesantren yang neutral politik.¹⁴

Sementara, dalam menjalankan fungsi artikulasinya, pesantren membatasinya pada dua model pesantren yang menyokongnya, baik yang terbuka maupun tertutup. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan filter terhadap kepentingan yang teragregasi sebelum kemudian diartikulasikan sebagai usulan bagi munculnya kebijakan publik.¹⁵

Dua fungsi lainnya, fungsi pendidikan dan fungsi rekrutmen dihadkan hanya pada pesantren yang menunjukkan sokongannya, sama ada yang terbuka maupun yang tertutup. Pendidikan politik diberikan secara konsisten kepada pesantren baik melalui kursus langsung tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan di pesantren, maupun materi-materi politik yang disisipkan melalui pengajian. Pendidikan politik ala pesantren memang berbeza dengan pendidikan politik terhadap lembaga sosial lainnya. Akar dari penghormatan terhadap kebebasan mengungkapkan pendapat dikenal oleh kalangan pesantren melalui tradisi *halaqah* dan *bahtsul masail* (pembahasan masalah-masalah). Perdebatan argumentasi tentang hukum sebuah persoalan sangat terfasilitasi dalam forum-forum tersebut. Jika demokrasi dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, maka pesantren sesungguhnya memiliki ruh

¹⁴ Temu Bual Musa Zainuddin dan Okta Rijaya.

¹⁵ Temu Bual Okta Rijaya.

tersebut. Fungsi edukasi yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pesantren tidak lagi dimulai dari hakikat berbeza pendapat, tapi lebih pada upaya menjaga ideologi Islam *ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja). Meski pada praktiknya, pemahaman warga NU, termasuk yang menjadi elit politik, terhadap Aswaja itu sendiri tidaklah tunggal.¹⁶

Fungsi rekrutmen ini yang membezakan antara pesantren yang menyokong secara terbuka dan tertutup. Jika terhadap pesantren yang menunjukkan sokongan terbuka, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan rekrutmen langsung kepada pengurus pondok pesantren atau keluarganya, maka di pesantren yang menyokong secara tertutup, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya melakukan rekrutmen terhadap keluarga pesantren sahaja. Disini, ada faktor prioriti. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasti lebih mendahulukan rekrutmen dari kalangan pesantren yang terbuka sebelum kemudian ke pesantren yang menyokong secara tertutup.¹⁷

Jadual 4.1

Fungsi Parti Politik/Model Sokongan Pesantren	Agregasi	Artikulasi	Edukasi	Rekrutmen
Terbuka	X	X	X	X
Tertutup	X	X	X	X
Neutral	X			

Yang membezakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan parti lain di Indonesia ada pada ideologi yang dibawa sebagai ruhnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadikan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai basis ideologi yang terus ditawarkan kepada pemilih atau konstituennya. Partai Kebangkitan

¹⁶ Tentang perbedaan pemahaman elit politik terhadap Aswaja bisa dicermati dalam Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Perspektif Hermeneutika Gadamer*, Jakarta: LP3ES, 2014.

¹⁷ Temu Bual Qudratullah Shodiq.

Bangsa (PKB) menjadi agen sosialisasi ideologi untuk mengenalkan identitasnya. Disini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memerankan fungsi ideologisnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak hanya sekadar menjalankan empat fungsi seperti yang disinggung Neumann, tapi juga ada fungsi ideologis yang secara konsisten terus dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).¹⁸

Hal demikian dilakukan peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan jembatan bahagi kepentingan warga *Nahdliyyin* dalam bidang politik. Sehingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan terus menyebarkan paham yang menjadi alas gerak NU. Yang membezakan hanyalah ruangnya sahaja. Proses ideologisasi yang dilakukan oleh PKB itu menjadi faktor pembeza.¹⁹ Di Lampung, fungsi ini termanifestasikan dalam banyak praktik di lapangan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasuki ruang-ruang dimana proses sosialisasi nilai Ahlussunnah wal Jamaah memang sudah berlangsung, seperti dalam pengajian-pengajian, acara haul (ulang tahun) pesantren dan lainnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memanfaatkan ruang ini untuk memantapkan ideologi Islam yang terbuka, toleran dan peka terhadap keragaman.

Pada dasarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap menjangkarkan kekuatan politiknya di pesantren. Pertimbangan ini tak hanya bersifat pragmatik, tetapi juga historis. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak hanya berhubungan dengan pesantren pada momen pergantian kekuasaan, tetapi pesantren sendiri bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah jantung sekaligus lapisan inti.²⁰ Oleh

¹⁸ Temu Bual KH. Syamsudin Thohir, Musa Zainuddin, Okta Rijaya.

¹⁹ Temu Bual Musa Zainuddin.

²⁰ Ibid.

kerana itu, terhadap mereka yang tidak menunjukkan sokongan sekalipun (neutral, red), PKB tetap mengagregasi kepentingan-kepentingan warga pesantren.

Respon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pesantren yang menunjukkan sokongannya tentu lebih jelas. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengagregasi kepentingan, mengartikulasikannya sekaligus melakukan edukasi terhadap pesantren dalam pelbagai bentuk.²¹ Yang membezakan adalah saat melakukan rekrutmen terhadap kalangan pesantren. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memprioritikan kalangan pesantren yang menyokongnya secara terbuka.

Bagi pesantren sendiri, keterlibatan mereka dalam dunia politik bukanlah sebuah pengalaman baru. Institusi pendidikan Islam tertua ini telah memainkan peran-peran politiknya sebelum masa kemerdekaan hingga saat ini. Yang membezakan adalah artikulasi dari peran politik tersebut. Jika di era kemerdekaan, peran tersebut diartikulasikan dalam bentuk perjuangan fisik dan sekaligus mempertaruhkan nyawa, setelah reformasi 1998, peran itu lebih banyak disalurkan melalui parti politik dimana mereka menjadi konstituennya.²²

Visi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap ulama atau kiai serta pesantren didalamnya, menurut Muhaimin Iskandar adalah bahawa ulama tidak boleh bersikap apolitik atau lari dari politik, kerana politik dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang dapat dikategorikan sebagai kewajiban agama,

²¹ Ibid.

²² Temu Bual, KH. Syamsuddin Thohir.

disamping tuntutan situasi yang sudah bersifat darurat.²³ Kerana itu, keterlibatan kiai dan pesantren dalam dunia politik adalah mutlak adanya.

Dalam kajian mengenai peran kelompok elit, Suzane Keller menyebut bahawa dalam setiap kelompok masyarakat ada minoriti-minoriti yang berpengaruh.²⁴ Mereka merupakan peribadi-peribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektiviti dengan cara yang bernilai sosial. mereka adalah minoriti-minoriti yang efektif dan bertanggungjawab. Efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Mereka bertanggungjawab untuk merealisasikan matlamat-matlamat sosial yang utama dan kelanjutan tata sosial.

Pengaruh kelompok ini cukup signifikan dalam masa perubahan sosial, terutama terhadap latar belakang perubahan tersebut. Ia memerankan dua sifat pokok, moral dan fungsional. Sifat moral menitikberatkan pada keutamaan moral peribadi-peribadi dan yang fungsional menekankan peran fungsional dari satu lapisan. Kelompok elit penentu ini, kata Keller berbeza dengan kasta penguasa, aristokrasi dan kelas-kelas dominan di masa lalu yang ada persamaan dengannya dalam tujuan sosial umumnya tetapi berbeza dalam pencerminannya dalam organisasi-organisasi tertentu.²⁵

Peranan elit ini, yang secara sosial dinilai sebagai lambang kolektif. Ada tiga bahagian dari lambang kolektif ini, iaitu yang bersifat kognitif, moral dan

²³ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa dengan Visi Ulama*, Jogjakarta: Klik.R, 2006, hlm. 115.

²⁴ Suzane Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 3.

²⁵ Ibid., hlm. 377.

ekspresif.²⁶ Dalam hal yang bersifat kognitif, golongan elit memberi kerangka referensi yang berwenang bagi masyarakat dan dengan demikian menolong mereka mentafsirkan perbuatan dan peristiwa yang mempengaruhi mereka. Sementara dalam peranan moral, mereka berperang memperkuat solidariti sosial dan tingkah laku moral. Mereka menekankan pada segi moral untuk mengingatkan manusia pada hakikat kehidupannya. Yang terakhir adalah simbolisme ekspresif yang menyediakan ketentuan pemuasan intrinsik kepada manusia, kepada reaksi-reaksi emosional yang mereka pancing dan bangkitkan. Elit penentu sebagaimana dengan bentuk kolektif lainnya, memberi jalan kepada pembawaan dan kesukaan kolektif yang lebih mendasar. Unsur fisik yang mana yang paling dihargai yang memberikan pandangan terhadap pilihan dan standar estetis yang dianut bersama secara luas, standar yang sering cepat sekali menjadi mapan.

Kosmologi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah pesantren. Kerana di pesantren, kiai adalah figur kunci, maka posisi serta perannya sangatlah sentral.²⁷ Jadi kiai ini adalah elit penentu dalam kosmologi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia adalah *the ruling class*, posisi yang berperan dalam mengawal perubahan sosial dan memastikan stabilitas politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Disinilah keterlibatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam dunia politik sebagai suatu keharusan.

Allan A Samson menyitir pernyataan KH. A Wahab Chasbullah mengatakan bahawa Islam dan politik seperti gula dan manisnya. Keduanya dapat dipisahkan saat

²⁶ Ibid., hlm. 222

²⁷ Temu Bual Okta Rijaya.

seseorang mampu memisahkan gula dari manisnya.²⁸ Peran kiai, terutama dalam hal yang bersifat strategik dan jangka panjang, akan sangat penting dalam dinamika politik bangsa. Peran kiai dalam hal yang menyangkut politik kebangsaan serta menyangkut hal fundamental terkait dengan kepentingan dasar masyarakat seperti kesejahteraan dan pendidikan, serta politik yang bersifat strategik menyangkut eksistensi dan kemandirian negara dalam hubungan antara bangsa.²⁹

Kajian Azizah menjelaskan tentang hasil kajiannya terhadap kiai di dua kabupaten di Madura, Jawa Timur. Ia menuturkan bahwa kalau kiai dalam had-had tertentu memiliki dua fungsi politis dan fungsi kultural.³⁰ Secara sosiologis, kiai mendapatkan basis sosial yang kukuh kerana pengaruh sekaligus fungsi dari pondok pesantren. Meski kadang didapat dari masyarakat, tetapi tak jarang kalau status ini juga diturunkan secara genealogis kepada anak atau saudara sedarah untuk menggantikan kiai sebelumnya.

Kiai yang aktif di dunia politik, masih menurut Azizah, setidaknya memiliki modal kekuatan kultural iaitu sebagai pengasuh pondok pesantren, serta pemuka agama dan aktif di organisasi kemasyarakatan (baca: NU).³¹ Selain itu kiai biasanya memiliki modal struktural sebagai pengurus partai dan posisi ini menjadi jembatan baginya untuk menaikan karir politik. Tak hanya itu, dalam konteks yang spesifik misalnya kiai yang menjadi Bupati atau Walikota, kemampuan beradaptasi akan menjadi faktor penentu dalam upayanya untuk menjadi bagian dari posisi politik.

²⁸ Karl D. Jackson dan Lucian W Pye (eds), *Political Power and Communications in Indonesia*, Berkeley-Los Angeles, London: University of California Press, 1978, hlm. 213.

²⁹ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi*, hlm. 116.

³⁰ Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press, 2013, hlm. 260.

³¹ Ibid.

Posisi kiai sebagai elit penentu dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disokong secara struktural oleh parti ini. Mereka mewadahi kiai dalam posisi Dewan Syura. Mereka yang menjadi bahan pertimbangan yang kemudian dilaksanakan oleh Ketua Tanfidziyah.

Peran kiai di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat besar terutama menyangkut visi besar politik Indonesia. Kata Muhaimin, peran penting itu setidaknya dijabarkan dalam tiga garis pokok.³² *Pertama*, keterlibatan ulama atau kiai dalam perubahan politik dan ekonomi sangat penting untuk mentransendensi politik dan ekonomi hal yang bersifat praktis-pragmatik sehingga proses perubahan memiliki dimensi etis dan spiritual yang mendorong para elit politik memiliki tanggungjawab moral kepada masyarakat, alam dan Penciptanya, serta melaksanakan tugas tersebut sebagai manifestasi dari fungsinya sebagai khalifah.

Kedua, diantara tugas keulamaan yang paling dasar sebagaimana tradisi kenabian adalah menjadikan agama sebagai dasar bagi transformasi sosial dan perekat bagi kohesi sosial yang plural dan multikultural. Islam datang untuk merubah struktur dan kultur masyarakat Arab untuk menuju tatanan yang lebih kondusif bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran.³³ *Ketiga*, sebagaimana Walisongo, dakwah kiai dan ulama di tengah masyarakat ialah dakwah kebudayaan dalam erti selalu menggunakan pendekatan kebudayaan dalam menyampaikan ajaran Islam dan sekaligus mengintegrasikan agama dalam pelbagai ekspresi kebudayaan masyarakat.³⁴

³² A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi*, hlm. 127-129

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Dengan berpegang pada prinsip tersebut, maka proses-proses politik dan pembangunan sosial yang berlangsung dapat berjalan seiring dengan transformasi budaya masyarakat. Institusionalisasi demokrasi akan berjalan beriringan dengan tumbuhnya mentalitas serta kesadaran politik warga negara dan nilai kejujuran dan keteladanan di kalangan elit.³⁵

Pentingnya peran kelompok elit seperti halnya kiai atau tokoh agama dalam negara yang sedang mengalami transisi demokrasi ini, selari dengan penjelasan Georg Sorensen tentang karakter dan penggambaran tentang demokrasi yang berlangsung di sebuah negara yang mengalami proses transisional tersebut.³⁶ Kata Sorensen, negara yang mengalami transisi demokrasi itu setidaknya dicirikan oleh empat hal, demokrasi terhad, demokrasi yang lemah dan tidak solid, persoalan ekonomi dan organisasi dan mobilisasi massa dalam perjuangan sosial.

Demokrasi terhad merupakan sistem politik dimana didalamnya memiliki elemen demokrasi tetapi juga memiliki keterbatasan pada kompetisi, partisipasi dan kebebasannya.³⁷ Kerap kali ada kelompok elit yang anggotanya memiliki hak untuk melakukan intervensi proses demokrasi untuk melindungi kepentingan mereka tersebut. Kesepakatan kelompok elit (militer, elit ekonomi atau politisi utama), boleh menyebabkan transisi menuju demokrasi sangat bergantung pada suatu kesepakatan atau pakta politik yang mendefinisikan bidang-bidang vital dari kepentingan para elit.³⁸

³⁵ Ibid.

³⁶ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS, 2003, hlm. 82.

³⁷ Ibid., hlm. 83

³⁸ Ibid., hlm. 83.

Karakter kedua dari transisi demokrasi adalah demokrasi yang lemah dan tidak solid. Ini sesungguhnya berkaitan dengan karakter pertama. Kerana pada dasarnya, demokrasi terhad ialah demokrasi yang lemah dan tidak solid. Jika Robert A. Dahl, seperti dikutip Sorensen, mencatat ada lima keadaan yang dianggap menyokong pembangunan poliarki yang stabil, maka demokrasi yang lemah tak memiliki keadaan tersebut. Lima hal yang disinggung Dahl adalah (i) pemimpin yang tidak menggunakan instrumen utama koersi kekerasan iaitu polis dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan (ii) terdapat organisasi masyarakat yang pluralis dan moden (iii) potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada peringkat yang masih dapat ditoleransi (iv) diantara penduduk negeri, khasnya lapisan politik aktifnya, terhadap budaya politik dan sistem keyakinan yang menyokong idea demokrasi dan lembaga poliarki (v) dampak dari pengaruh atau kawalanl oleh negara asing dapat menghambat atau menyokong secara positif.³⁹

Ciri ketiga dari transisi demokrasi ialah tidak stabilnya keadaan sosial dan ekonomi.⁴⁰ Di banyak negara, krisis ekonomi seringkali menjadi latar belakang pemecatan pemerintah sebelumnya. Meski rezim tersebut sudah berganti tetapi warisan masalah sosial serta ekonomi yang akut akan ditangani oleh pemerintahan demokratik yang baru.

Meski tiga karakter dari negara yang sedang mengalami transisi demokrasi menunjukkan wajah suram, tetapi ada yang cukup menjanjikan dalam situasi

³⁹ Ibid., hlm. 94-95.

⁴⁰ Ibid.

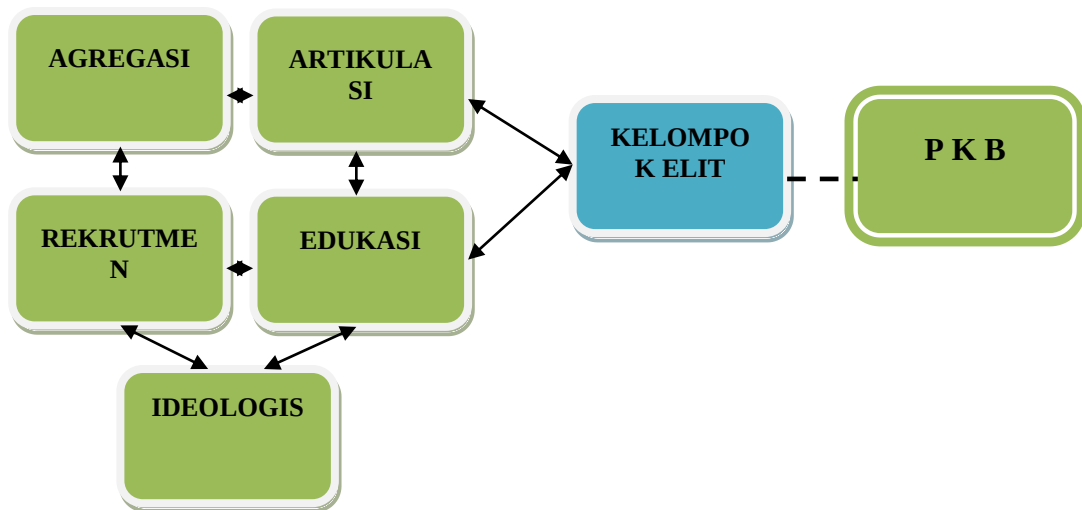
tersebut, yaitu kehadiran organisasi dan mobilisasi massa.⁴¹ Dalam banyak kes, gerakan muncul bersamaan dengan kebangkitan di masyarakat, dimana pelbagai kelompok dari seluruh penjuru bergabung bersama untuk membentuk dirinya sebagai kelompok yang lebih besar dan menyebut dirinya sebagai rakyat.

Dalam situasi inilah maka kehadiran kelompok-kelompok elit penentu seperti kiai dan tokoh agama menjadi sangat penting dalam keadaan semacam itu.⁴² Karena proses organisasi dan mobilisasi massa itu tak lebih dari sebuah ledakan singkat dan intensif, yang mati dengan cepat, maka pengawalan terhadap proses ini menjadi sangat penting. Disinilah kelompok seperti kiai dan tokoh masyarakat penting untuk memainkan peran untuk menjaga tidak terjadinya disintegrasi yang lebih meluas.

Ini ertinya proses demokrasi harus berjalan secara dari bawah ke atas, *bottom up*. Dan ini tentu memerlukan orang-orang yang mempunyai kebolehan untuk menjadi *prime mover*. Dalam wilayah inilah Kiai memainkan peranannya untuk menciptakan budaya sipil melalui media *civic education*.

⁴¹ Ibid.

⁴² Studi mengenai keterlibatan kiai dalam pemilihan presiden di Indonesia bisa dicermati dalam Munawar Fuad Noeh, *Kyai di Panggung Pemilu: Dari Kyai Khos Sampai High Cost*, Jakarta: ReneBook, 2014.



Rajah 5.3: Peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Perspektif Fungsi Parti Politik

Keterlibatan kiai dalam panggung politik setidaknya didorong oleh dua motivasi. Pertama, kiai adalah bagian dari masyarakat sehingga bisa memahami problem dan aspirasi masyarakat. Kedua, pengalaman selama ini dimana kiai dan para umatnya hanya dimandatkan oleh para politisi tanpa keuntungan yang dirasakan terkait dengan aspirasi yang mereka titipkan pada politisi tersebut.⁴³ ketiga, membuka akses bagi sumberdaya ekonomi. Keterlibatan kiai dalam politik menjadi cara untuk mendapatkan akses langsung menuju sumber daya ekonomi yang berada dalam kekuasaan negara.⁴⁴

Dalam praktiknya di lapangan, beberapa peran dilakukan oleh kiai saat mereka terjun langsung di politik. (i) mengeluarkan pernyataan terbuka tentang dukungannya kepada calon atau partai politik tertentu. (ii) menyerukan untuk memilih calon atau parti tersebut. (iii) menjadikan pesantren sebagai ajang konsolidasi politik. (iv) mengeluarkan fatwa untuk memilih pasangan tertentu

⁴³ Ibid., hlm. 256.

⁴⁴ Ibid., hlm. 256-257.

dengan disertai basis argumentasi yang diderivasi dari al-Qur'an maupun Hadits. (v) konsolidasi antar sesama kiai untuk menyatukan dukungan. (vi) menjadi juru kempen. (vii) melakukan mobilisasi masa.⁴⁵

Tidak semua kiai-kiai NU berafiliasi ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Abdul Halim, salah satu alasan mengapa ada perbezaan afiliasi politik tersebut adalah perbezaan interpretasi terhadap *Aswaja* (ahlus sunnah wal jamaah).⁴⁶ Elit NU atau khususnya kiai-kiai tersebut memiliki perbezaan dalam menginterpretasikan *Aswaja*. Dalam kategorisasinya Halim, kiai NU yang memilih PPP cenderung literalis-rasionalis dalam memahami *Aswaja*, rasionalis murni ada di PKB, rasionalis-spiritualis memilih PKB atau Partai Kebangkitan NU (PKNU) sementara literalis murni lebih memilih PKS.⁴⁷

Interpretasi kiai NU di PKB terhadap *Aswaja*, kata Halim, salah satunya dicirikan oleh pendekatan interpretasi logik (*takwil*) dan implisit (*ma'ani*) dalam memahami al-Qur'an.⁴⁸ Pendekatan semacam ini dipadukan dengan langkah rekonstruktif terhadap tradisi lokal agar sesuai dengan syariat Islam. Ciri lain yang bisa dicermati dari cara pandang kiai NU di PKB adalah melakukan proteksi terhadap masyarakat dari mistis-metafisis, tetapi tidak terlalu ketat atau permisif.⁴⁹ Agama, dalam pandangan PKB hanya memberikan prinsip-prinsip demokrasi secara konseptual, sementara tataran teknikal operasional diserahkan sepenuhnya kepada

⁴⁵ Ibid., hlm. 258-260.

⁴⁶ Abdul Halim, *Aswaja Politisi*.

⁴⁷ Ibid., hlm. 206.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

pelaku politik sesuai dengan konteks dan kondisi sosio-kultural yang ada. Prinsip yang dimaksud PKB ini adalah musyawarah, keadilan dan kebaikan publik.⁵⁰

Fungsi Parti Politik dan Cabarannya: Kajian Kes Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung

Kekuatan elektoral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Negeri Lampung, sesungguhnya masih sangat kuat dengan dukungan dua fondasi kultural yang sangat penting, iaitu NU dan etnis Jawa. Ini adalah peluang sekaligus cabaran yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada kenyataannya, Lampung adalah provinsi di luar Jawa dengan konsistensi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang relatif konsisten.

Meski Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki kekhasan dengan tumbuhnya pesantren sebagai lapisan inti parti, tetapi hal tersebut tentu tidak serta merta mengeluarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari cabaran dan dugaan yang selalu sahaja menghadang dan pada tahap tertentu, berpotensi mengurangi kekuatan parti.⁵¹

Bahkan, dalam sejarah parti politik di Indonesia, banyak sekali terjadi sentimen anti parti.⁵² *Pertama*, penyangkalan terhadap parti (*the denial of party*).

⁵⁰ Ibid., hlm. 261.

⁵¹ Temu Bual Musa Zainuddin.

⁵² Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*, Yogyakarta: Institute of Democracy and Welfarism, 2011, hlm. 232-234.

Sentimen seperti ini terjadi pada masa Presiden Sukarno yang dalam salah satu pidatonya mengajak kepada masyarakat untuk mengubur parti politik.⁵³

Kedua, penolakan selektif terhadap parti (*the selective rejection of party*). Inti dari cara pandang ini adalah melihat bahawa ada parti yang baik dan buruk. Penolakan Masyumi dan NU terhadap PKI pada masa Presiden Sukarno merupakan salah satu bentuk penolakan yang bersifat selektif terhadap parti.⁵⁴

Ketiga, penolakan selektif terhadap sistem parti (*the selective rejection of party system*). Situasi ini terjadi pada masa orde baru. Saat itu, sistem parti yang diperkenankan untuk berkembang adalah sistem kepertaian hegemonik dengan jumlah kontestan pemilu yang dihadkan. *Keempat, the redundancy of party*. Pada kes seperti ini, rakyat Indonesia tidak lagi mempercayai parti politik sebagai artikulator kepentingan mereka, tetapi mereka menganggap institusi lain lebih layak.⁵⁵

Dengan menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung sebagai kajian kesnya, maka penulis mengidentifikasi empat kemungkinan tantangan yang akan dihadapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menjalankan peran serta fungsinya iaitu: (i) Konsistensi dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya; (ii) Faktor Prioriti dan Masalah Pragmatisme Politik; (iii) Problem Kultural Konstituen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung; dan (iv) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Lemahnya Mengelola Pengurusan Konflik Elit.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

Konsistensi dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya

Salah satu cabaran terbesar dari parti politik ialah konsistensi mereka untuk menjalankan peran serta fungsinya. Masalahnya tentu sangatlah kompleks. Fungsi parti politik dalam konteks agregasi, artikulasi, pendidikan serta rekrutmen memang tidak bisa dipisahkan dari komunikasi politik parti.⁵⁶

Yang seringkali terjadi adalah parti politik yang hadir hanya menjelang dilaksanakannya pemilihan kekuasaan. Disinilah masalah konsistensi itu muncul. Parti politik seperti hanya berfungsi pada saat pergantian kepemimpinan, baik eksekutif mahupun legislatif. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebenarnya bukan satu-satunya parti yang kerap berdepan dengan masalah ini. Dan Lampung juga bukan satu-satunya daerah dimana peran parti politik begitu menggeliat menjelang momen pergantian kekuasaan. Boleh dikatakan, ini adalah masalah akut yang menimpa hampir semua parti politik di segala daerah.⁵⁷

Beberapa pimpinan pondok pesantren di Lampung yang merasa “ditinggal” oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selepas momen politik setidaknya menunjukkan kecenderungan itu. Keperluan mereka akan konstituen seperti hanya dibatasi oleh rentang waktu dimana proses politik berlangsung. Selepas itu, maka akar rumput ditinggalkan.

Disini, sebenarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki keuntungan tersendiri. Dari sisi ideologi, (PKB) lebih mudah untuk merawat konstituennya

⁵⁶ Temu Bual Okta Rijaya.

⁵⁷ Ibid.

karena dibingkai oleh ideologi yang lebih jelas. NU, Pesantren, Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah kata kunci yang dengannya, praktik politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih mudah dialirkan melalui saluran-saluran tersebut.⁵⁸

Faktor Prioriti dan Masalah Pragmatisme Politik

Tantangan berikut yang dihadapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah kerana setiap parti pasti akan mengandalkan kekuatannya untuk meraup suara di komuniti inti.⁵⁹ Meski tidak ada perjanjian atau percakapan langsung tentang timbal balik, tetapi yang terjadi pasti adalah bagaimana agar suara itu kemudian berbuah sokongan terhadap komuniti inti ini.

Tak dinafikan, bahawa peran pesantren disini sangatlah besar dalam menopang kekuatan elektoral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Maka, jika kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan perhatian lebih kepada pesantren, ini dapat dipahami dari logika politik dan kekuasaan. Tetapi, tentu ini kemudian menimbulkan tanda tanya. Apakah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian hanya menjadi parti bagi warga pesantren sahaja?

Masalah pragmatisme politik memang persoalan yang hampir ada dalam kerja-kerja politik. Jurang antara idealisme dan pragmatisme begitu jauh. Kerana itu, perlu ada jambatan untuk menguranginya. Parti, mestinya boleh melakukannya melalui proses sosialisasi politik yang masif.⁶⁰

⁵⁸ Temu Bual Musa Zainuddin.

⁵⁹ Temu Bual Amin Thohari.

⁶⁰ Temu Bual Musa Zainuddin.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang memiliki hubungan sejarah serta ideologi dengan pesantren. Bahawa kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan pesantren sebagai komunitas inti, maka hemat penulis ini tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pragmatik politik. Kerana, pada lapisan berikutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyasarkan kalangan luar pesantren atau masyarakat dalam pengertian luasnya.⁶¹

Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pesantren, dengan meminjam analogi KH. Wahab Chasbullah, sama halnya dengan Islam dan Politik, adalah seperti gula dan manisnya. Kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sangat tergantung dari seberapa besar ia berkomunikasi secara intensif dengan kalangan pesantren. Dan dengan mereduksi kekuatan pesantren, maka sesungguhnya itu adalah cara untuk juga mereduksi kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁶²

Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terutama di tahun 2008 dan berimbas pada perolehan suara di pemilu 2009, merupakan salah satu bentuk dari polarisasi kekuatan pesantren yang menyebabkan menurunnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁶³ Dan ini, sekali lagi, disebabkan oleh kekuatan pesantren yang tak lagi ada di satu jalur.

Problem Kultural Konstituen Partai Kebangkitan Bangsa PKB Lampung

Cabaran yang dihadapi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung adalah parti ini yang dicirikan sebagai saluran politik Islam tradisional Jawa. Ini tentu

⁶¹ Temu Bual KH. Ngaliman Marzuqi.

⁶² Temu Bual Musa Zainuddin.

⁶³ Ibid.

berkaitan dengan sejarah kebudayaan masyarakat Lampung itu sendiri, dimana etnik Jawa cukup memiliki tempat dan berperan penting dalam pembangunan masyarakat Lampung. Disini, kekhawatiran menguatnya dikotomi Lampung-Jawa menjadi hal yang patut dicermati.⁶⁴

Di sisi lain, masyarakat Lampung itu sendiri memang memiliki keunikan dalam proses pembentukan budayanya. Ahmad Syarief Kurniawan, seorang aktivis muda NU memberikan ilustrasi yang sangat tepat mengenai tentang bagaimana identifikasi masyarakat Lampung terkait kebudayaannya tersebut.

“Orang Cina di Palembang itu ya menggunakan Bahasa Palembang. Orang Cina yang di Pekanbaru-Riau itu juga menggunakan Bahasa Melayu. Orang cina di Jawa Barat juga menggunakan Bahasa Sunda. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur mereka juga berbahasa Jawa. Sementara, Orang Cina Lampung itu tidak menggunakan Bahasa Lampung. Ini yang menarik, karena mereka justru menggunakan bahasa *loe gue*. Jadi disinilah menariknya memahami sosiologi serta antropologi orang cina di lampung. Di mana-mana Cina itu selalu bisa beradaptasi dengan tempat yang ia tinggal. Di Bugis, orang cina itu adaptasi dengan budayanya”.⁶⁵

Syarief kemudian menambahkan bahwa masalah di atas terkait dengan budaya Lampung itu sendiri.⁶⁶ Kalau di Jawa, Sunda, Batak, Melayu memiliki daya tekan kepada para pendatang untuk ikut bahasanya. Sementara di Lampung, tidak ada tekanan bagi pendatang untuk kemudian berbahasa Lampung. Mereka tidak kemudian mengajak pendatang itu berbahasa Lampung, tetapi justru menggunakan Bahasa Indonesia.

Problem budaya ini sedikit sebanyak juga berpengaruh terhadap pemerataan kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pengidentifikasian Partai Kebangkitan

⁶⁴ Temu bual Ahmad Syarief Kurniawan, 22 September 2013.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

Bangsa (PKB) sebagai “parti Jawa” itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Lampung yang sangat cair. Meskipun begitu, ini sebenarnya masih boleh dicarikan solusinya dengan menjadikan NU sebagai jembatan tersebut. Bahawa dalam NU itu sendiri, kekuatan masyarakat Jawa masih kuat, tetapi sesungguhnya masyarakat Lampung sendiri sudah mulai tumbuh dan berkembang di kepengurusan NU baik di peringkat cawangan (kabupaten/kota) mahupun wilayah (provinsi).⁶⁷

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Lemahnya Mengelola Pengurusan Konflik Elit

Meski akar ideologi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai parti politik sudah cukup kuat, tetapi orde baru yang sangat kuat melakukan pembatasan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuat parti ini sejatinya belum cukup matang mengelola banyak persoalan yang dideranya. Sebagai parti, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) relatif baru, sementara sumberdaya manusia yang dimilikinya belum sepenuhnya siap dalam mengelola parti serta kemungkinan konflik yang sering terjadi. Orang pesantren yang baru terlibat dalam dunia politik, kemudian mengalami kegagapan dalam mengatasi masalah dalaman seperti konflik kekuasaan dan sebagainya.⁶⁸

Konflik elit dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti yang terlihat dalam sejarah perkembangan parti ini adalah sesuatu yang sangat sering dijumpai. Jika dicermati, tentu saja ini sebuah peristiwa yang melibatkan para elit politik yang kemudian berimbas pada goyahnya struktur yang ada di bawahnya. Pada kenyataan

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Temu Bual Musa Zainuddin.

bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas, yang mencakup (1) Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; (2) sejumlah massa yang ditakdirkan untuk memerintah. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan masa umum (*non-elite*).⁶⁹

Dalam teori tersebut, kemudian dijelaskan dengan asas general dimana kekuasaan dianggap tidak terdistribusikan secara merata. Asas berikutnya dalam teori elit adalah bahwa orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik "penting" dan mereka yang tidak memilikinya.⁷⁰ Selain asas itu berlaku juga asas kalau secara internal elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok. Elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (*self perpetuating*) dan keanggotaannya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sangat terbatas (*exclusive*). Karena itu semua, kelompok elit itu pada hakikatnya bersifat otonom, kebal terhadap gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.⁷¹

Dalil yang harus senantiasa diingat dalam studi elit politik adalah bahwa kekuasaan didistribusikan dengan tidak merata. Dan hanya sedikit sekali proporsi warga negara yang mampu secara langsung mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional. Dasar inilah yang menjadikan munculnya dualisme dalam masyarakat.

⁶⁹ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hlm. 199.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Penggambaran secara langsung mengenai distribusi kekuasaan ini dapat dilihat pada suatu model umum stratifikasi politik.⁷² Melalui model umum stratifikasi politik ini, sistem politik dapat dipandang berlapis-lapis atau dengan kata lain bahwa sistem politik tersebut berstratifikasi politik, yang terbagi dalam enam lapisan atau strata umum, yaitu (dari atas ke bawah): kelompok pembuat keputusan, kaum berpengaruh, aktivis, publik peminat politik, kaum partisipan, dan non partisipan. Dalam studi elit politik, kekuasaan diartikan sebagai probabilitas untuk mempengaruhi kebijakan dan kegiatan negara atau (dalam istilah teori sistem) probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif.⁷³

Konflik dalam tubuh elit biasanya merujuk pada keadaan dimana seseorang atau suatu kelompok dengan identitas yang jelas, terlibat pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih kelompok lain karena kelompok-kelompok ini mengejar atau berusaha mencapai tujuan. Pertentangan tersebut polanya dapat hanya sebatas pertentangan nilai, atau menyangkut klaim terhadap status atau jabatan politik, kekuasaan, dan atau sumberdaya-sumberdaya yang terbatas, serta dalam prosesnya seringkali ditandai oleh adanya upaya dari masing-masing pihak untuk saling menetralisasi, menyederai, hingga mengeliminasi posisi/eksistensi rival atau lawawannya.⁷⁴

Konflik merupakan suatu pertumbuhan antara dua atau lebih dari dua pihak yang masing-masing mencoba untuk menyingkirkan lawannya dari arena kehidupan bersama, atau setidaknya tidaknya menaklukkannya dan mendegradasikan lawannya ke posisi yang lebih ter subordinasi. Konflik elit bisa muncul dari dalam kelompok itu

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid., hlm. 200.

⁷⁴ Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*, New York: Free Press, 1956, hlm. 3.

sendiri atau antar kelompok penguasa dan kelompok tandingan.⁷⁵ Menurut Pareto, sirkulasi elit terjadi dalam dua kategori. *Pertama*, pergantian terjadi di antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri. *Kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Mosca melihat bahwa pergantian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas penguasa yang baru.⁷⁶

Kemunculan konflik pada kelompok elit politik terjadi bila mereka tidak bisa berkompetisi secara sehat, cenderung memanipulasi aspek primordialisme dan keberagaman dalam masyarakat. Aspek tersebut bisa berupa kekuatan garis keturunan (darah biru), pemahaman nilai-nilai keagamaan, dan lain sebagainya. Sudirman, seperti dikutip Imam Hidajat menyebut konflik elit sebagai Nekrofilia.⁷⁷ *Nekrofilia* berasal dari bahasa Yunani *nekros* yang berarti jasad, mayat atau penghuni kubur. Dalam bahasa Latin, *Nex* juga berarti kematian paksa atau pembunuhan. Konsep tersebut berarti bahwa nekrofilia berarti “keterikatan kuat terhadap segala sesuatu yang mati, membusuk, beraroma busuk dan penyakit.

Istilah tersebut sebenarnya sebagai bentuk sindiran terhadap perilaku elit politik. Sindiran itu dialamatkan kepada mereka yang menjebak dirinya dalam konflik dan penghancuran satu dengan lainnya, demi kategorisasi kita (*the us*) dan mereka (*the others*) tanpa alasan memadai. Terjadinya pertarungan di level elit tersebut disebabkan adanya strategi personal untuk mengangkat tokoh-tokoh politik

⁷⁵ Irtanto, “Konflik Elit Politik Lokal dalam Proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi”, *Cakrawala*, vol. 1 No. 1 Desember 2006, hlm. 29.

⁷⁶ S.P. Varma, *op.cit.*, hlm. 275-309..

⁷⁷ Imam Hidajat, *Teori-teori Politik*, Malang: SETARA, 2009, hlm. 104

yang berkaitan dengan beberapa aspek yakni legitimasi politik, masalah kekuasaan, representasi elit politik dan adanya kaitan dengan masalah perubahan politik atau masa transisi.⁷⁸ Sumber konflik juga sering berpusat pada usaha untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar atau kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan.⁷⁹ Kekuasaan disini tentunya didasarkan atas beberapa pengertian seperti kekuatan, legitimasi, otoritas, atau kemampuan untuk memaksa.

Dalam dunia politik, bagaimanapun juga konflik mesti harus dapat dikendalikan. Ada beberapa hal yang diidentifikasi bisa menjadi solusi atau cara pengendalian konflik yaitu:⁸⁰ *Pertama*, masing-masing kelompok yang terlihat di dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka, oleh karena itu perlu pula menyadari dilaksanakan prinsip-prinsip keadaan dan keadilan secara jujur bagi semua pihak.⁸¹

Kedua, pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir secara jelas. Sejauh kekuatan sosial yang saling bertentangan berada di dalam keadaan tidak terorganisir, maka pengendalian atas konflik-konflik yang terjadi di antara merekapun akan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Sebaliknya konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok akan lebih mudah melembaga, dan oleh karena itu akan lebih mudah dikendalikan pula.⁸²

⁷⁸ Ibid., hlm. 105.

⁷⁹ Irtanto, *op.cit.*, hlm. 30.

⁸⁰ Abdul Syani, *Realitas dan Pengendalian Konflik dalam Perspektif Sosiologis*, Makalah tidak diterbitkan, tt. hlm. 5

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

Ketiga, setiap kelompok yang terlibat di dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan-permainan tertentu, suatu hal yang akan memungkinkan hubungan-hubungan sosial di antara mereka menentukan suatu pola tertentu. Aturan-aturan permainan tersebut, pada gilirannya justru menjalin kelangsungan hidup kelompok itu sendiri oleh karena dengan demikian ketidakadilan akan dapat dihindarkan, memungkinkan tiap kelompok dalam meramalkan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kelompok yang lain, serta menghindari munculnya pihak ketiga yang akan merugikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.⁸³

Keempat, solidaritas sosial dibagi oleh dua solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis yaitu diikat oleh sifat solidaritas kolektif sedangkan solidaritas organis adalah sifat yang diikat oleh saling ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial, tidak mudah dikembangkan atau ditumbuhkan di dalam masyarakat yang bersifat plural.⁸⁴

Gunaryo, mengajukan enam model pendekatan terhadap munculnya konflik.⁸⁵ *Pertama*, pendekatan ketahanan sosial (*social resilience*). Cara ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mudah termakan oleh isu yang belum jelas. Pendekatan ini mengasumsikan dalam masyarakat ada kemampuan internal untuk mengatasi konflik maupun perselisihan. *Kedua*, pendekatan kesejahteraan (*social prosperity*). Asumsi dasar dari pendekatan ini menyatakan kalau konflik terjadi akibat dari adanya kemiskinan. Kemiskinan ini selanjutnya memicu sejumlah

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Achmad Gunaryo, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya" dalam M. Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC dan Nuffic, 2007, hlm. 39-42.

potensi kerawanan sosial. Dengan begitu, maka kesejahteraan yang baik akan diharapkan dapat mengeliminir konflik.

Ketiga, pendekatan keamanan (*security*).⁸⁶ Pendekatan model ini mengindikasikan adanya tindakan-tindakan represif terhadap adanya setiap bentuk konflik. Dengan pendekatan ini, negara memiliki hak untuk melakukan apa saja untuk tidak hanya mencegah, tapi juga meredam konflik. *Keempat*, pendekatan asimilatif yang bertujuan untuk mengaburkan identitas lama dan membentuk identitas baru. Pendekatan seperti ini biasa disiapkan untuk konflik yang bernuansa agama dan etnis. Karena tidak bisa disangkal kalau etnis dan agama menghasilkan batasan-batasan sosial (*social boundaries*). Perkawinan biasanya diidentifikasi sebagai model pendekatan asimilatif ketika terjadi konflik.⁸⁷

Kelima, pendekatan pembagian kekuasaan atau *power sharing*.⁸⁸ Pendekatan ini biasanya muncul dalam ranah politik. Pemecahan konflik dengan membagi-bagi kekuasaan ditengarai sebagai cara yang tepat dalam dunia politik, karena watak dari politik adalah kekuasaan. Dengan pembagian tersebut, maka diharapkan rasa diperintah oleh kelompok tertentu, paling tidak akan berkurang. *Keenam*, pendekatan hukum. Pendekatan seperti ini kerap kali muncul akibat lemahnya penegakan hukum. Hukum yang digadang-gadang bisa menghasilkan keadilan, justru malah berperan sebaliknya. Hukum yang adil, karenanya diharapkan bisa memecahkan konflik yang ada di masyarakat.⁸⁹

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

Jika kita mencermati konflik yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari kacamata konflik elit, bisa dikatakan kalau kemunculan konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jelas lebih merupakan *conflict of interest* bukan *conflict of ideology*. Konflik yang terjadi sama sekali tidak merubah ideologi partai ini. Konflik tersebut juga bukan dilatarbelakangi atas pluralitas identitas dan bukan karena kultur yang berkembang di masyarakat seperti adat, suku dan lainnya.⁹⁰ Konflik itu, lebih banyak disebabkan oleh ketidaksiapan elit dalam berkompetisi secara sehat maupun ketidaksiapan elit dalam menerima kekalahan.

Dalam kapasitasnya sebagai partai yang memiliki manajemen tradisional, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mengandalkan kharisma tokoh-tokoh politiknya.⁹¹ Terjadinya pertarungan di level elit tersebut lebih banyak disebabkan adanya strategi personal untuk mengangkat tokoh yang berkaitan dengan beberapa aspek yakni legitimasi politik, masalah kekuasaan, representasi elit politik dan adanya kaitan dengan masalah perubahan politik atau masa transisi. Dampak dari hal tersebut kemudian memunculkan buruknya komunikasi antar elit politik. Komunikasi yang tidak terjalin baik di internal partai maupun antar partai yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka di antara elit partai. Inilah awal dari nekrofilia itu.

Saat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergulat dengan konflik kubu Alwi dan Matori, pengamat politik Saiful Mujani, menganalisis persoalan tersebut dengan detail. Menurutnya, meski dalam kasus tertentu proses analisis harus dilakukan

⁹⁰ Temu Bual Musa Zainuddin, Okta Rijaya, Amin Thohari, Syamsuddin Tohir.

⁹¹ Ibid.

secara berlainan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa konflik-konflik yang bervariasi itu sebagian terkait dengan belum berlangsungnya pelembagaan partai hingga betul-betul menjadi sebuah partai politik yang merupakan gejala politik modern.⁹²

Lanjut Saiful, pada tingkat normatif, partai-partai politik yang ada sekarang belum menunjukkan identitasnya sebagaimana biasanya terumuskan dalam platform masing-masing partai.⁹³ Ini kemudian membuat identitas partai menjadi kabur, begitu juga yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Platform partai berlambang bintang sembilan ini pada dasarnya tidak berbeda dengan PDI-P atau Golkar yang sama-sama berorientasi kebangsaan dan kerakyatan. Dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ukuran seseorang dapat diterima disana tentu adalah masalah ke-NU-an. NU adalah jaminan bagi mobilisasi massa, dan karena itu pula derajat ke-NU-an seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan faktor bagi *bargaining* dalam rekrutmen ini.⁹⁴

Ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusaha untuk menjadi modern dan terbuka, maka rekrutmen dari aspek ke NUan diperlonggar, terutama lewat inisiatif Gus Dur. Kehadiran Alwi Shihab yang identitas sosial-politik ke-NU-annya dikenal tidak setebal Matori Abdul Djalil atau Muhaimin Iskandar misalnya, direkrut Gus Dur untuk menjadi orang kepercayaannya di Partai Kebangkitan Bangsa

⁹² Saiful Mujani, Konflik-konflik dalam Partai Politik, *Kompas*, 03-12-2001, hlm. 32.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid. Lihat juga dalam A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 46-47

(PKB).⁹⁵ Disinilah kemudian muncul dinamika baru. Paling tidak, Alwi menggeser Matori sebagai orang kepercayaan utama Gus Dur. Kondisi serupa juga terjadi ketika konflik GD-Muhaimin. Kubu Muhaimin menilai GD terlalu terbuka sampai merekrut kelompok Muhamadiyyah seperti Muslim Abdurrahman untuk masuk ke dalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam *formative period* atau masa pembentukan partai, ketokohan bagaimanapun juga tetap menjadi faktor pengikat terpenting bagi soliditas partai, dan partai-partai di Indonesia masih berada pada periode ini. Karena itu, kalau terjadi persaingan di antara elite yang melingkari sang tokoh, itu merupakan hal yang biasa.⁹⁶

Kalau persaingan ini memunculkan konflik yang serius, misalnya lahirnya dualisme kepemimpinan, hal itu sebagian terletak pada kultur politik para elite tersebut yang belum biasa memperlakukan konflik sebagai hal yang biasa, yang biasa dinegosiasikan, dan sumber bagi kematangan partai politik. Dalam kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resolusi konflik elit, kemudian diselesaikan dengan pendekatan hukum, bukan *sharing power*.⁹⁷ Resolusi dalam konflik itu kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Selanjutnya kelompok yang baru memegang peran dan menjadi kunci dalam memegang kekuasaan serta wewenang.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Achmad Gunaryo, "Konflik dan Pendekatan..."

Inti dari konflik elit dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah karena lemahnya budaya politik yang terbuka, toleran dan siap menerima kekalahan. Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah sikap orientasi warganegara terhadap sistem politik dan bagiannya, dan sikap terhadap warganegara yang ada dalam sistem itu.⁹⁸ Warga negara selalu mengidentifikasikan diri dengan simbol dan lembaga kenegaraan, serta menilai dan mempertanyakan posisi dan peranan mereka dalam sistem politik sesuai dengan orientasi mereka.

Idealnya, budaya politik juga harus memperhatikan budaya warganegara (*civic culture*). Istilah ini sebagai bentuk representasi antara tingkah laku politik dan sosial yang menjadi sangat krusial dalam suksesnya proses demokrasi modern.⁹⁹ Budaya warga negara menurut Almond dan Verba adalah sebuah budaya pluralistik dan berdasarkan pada komunikasi dan persuasi, yang mengizinkan terjadinya perubahan tapi tetap mengaturnya. Hasil dari penelitian Almond dan Verba, istilah *civic culture* memiliki fokus yang lebih sempit budaya pada umumnya, dan berhubungan dengan sikap budaya (*culture attitudes*).¹⁰⁰

Pelajaran berharga yang bisa diambil oleh elit PKB terhadap konflik yang selalu melatarbelakangi perjalanan partai ini adalah macetnya budaya politik yang terbuka terhadap kritik serta kesiapan untuk menerima kekalahan dan resiko buruk lainnya.¹⁰¹ Fatsun politik inilah yang seharusnya dipegang oleh semua kader PKB, terutama elit politiknya. Maturitas dalam berpolitik mutlak menjadi nyawa yang harus terus menjiwai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

⁹⁸ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 5-6

⁹⁹ Lihat Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Temu Bual, KH. Ngaliman Marzuki.

Pilihan Raya Umum 2014: Parti yang Sihat Sebagai Faktor Penentu

Seperti diketahui, pilihan raya umum tahun 2014 menjadi titik balik kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung. Ukurannya adalah naiknya jumlah anggota DPR, DPRD mahupun DPR RI. Kenaikan ini, menggambarkan keberhasilan sebuah proses panjang. Setelah dilanda konflik yang mengakibatkan kecilnya raihan suara, pada pilihan raya umum 2014, secara umum suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami kenaikan yang cukup besar.

Salah satu yang tampak ialah kejayaan mengangkat dua orang anggota DPR RI, iaitu Musa Zainuddin dan Chusnunia. Di Kabupaten Lampung Timur, jumlah anggota DPR juga bertambah, dari 3 menjadi 7 legislator.¹⁰² Di peringkat provinsi, suara signifikan juga ditunjukkan oleh parti ini. Pada 2009, tak satu pun kerusi di raih. Sementara 2014, PKB menghantarkan 7 kadetnya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung.

Seperti yang digambarkan sebelumnya, besarnya suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat ditentukan oleh kejayaan memadankan langkah dengan NU. Penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat Nahdliyyin khususnya, tentang bagaimana hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu strategi yang berkesan dalam meraih sokongan.¹⁰³ Strategi kemenangan yang dilakukan oleh fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung pada pilihan raya umum 2014 sesungguhnya memiliki benang merah. Mereka masih sangat menghandalkan suara NU dan pesantren. Kenyataan ini tak dapat dinafikan.

¹⁰² www.pemilu.asia.

¹⁰³ Temu Bual Musa Zainuddin.

Mereka misalnya ikut terlibat dalam kegiatan pengajian, hadir dalam kegiatan-kegiatan pondok pesantren, membantu mengadvokasi anggaran yang bersinggungan dengan kepentingan pesantren dan lainnya.

Salah satu yang menjadi kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah kerana parti ini memiliki “konstituen keras” atau katakanlah ideologis, yang dapat diidentifikasi sebagai warga NU dan pesantren.¹⁰⁴ Naik turunnya hubungan antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, keluarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari kemelut konflik yang melanda sejak menjelang pilihan raya umum 2004 juga sangat berperan dalam memantapkan perolehan suara. Sehingga boleh dikatakan bahawa parti yang sihat, baik dari sisi pengurusan, organisasi ataupun penanaman kepercayaan kepada orang ramai menjadi salah satu indikator kejayaan menaikkan suara.

Di beberapa tempat pemberdayaan ekonomi ahli atau kader juga mampu mendorong kinerja parti.¹⁰⁵ Disisi lain kader-kader menerapkan pandangan politik sebagai berikut, Memelihara tradisi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, Mengupayakan kebijakan pemimpin yang membawa manfaat bagi masyarakat.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Temu bual dengan Taufik Rahman, Ketua PKB Bandar Lampung, Ubaidillah Ketua DPC Pesawaran, Maulana M Lahudin Ketua DPC Pringsewu, Ali Yudiem, S.H. , Ketua DPC Pesisir Barat, Tabrani Rajab Ketua DPC Lampung Utara, Seh Ajeman Ketua DPC Way Kanan, Ky. Jupri, S.Pd Ketua DPC Mesuji, Qudratulloh Sidiq, S.H Ketua DPC Metro, Azwansyah Sekretaris DPC Tanggamus, Sholih Taufik, S.Pd.I Ketua DPC Tulang Bawang Barat, Yohansyah Akmal Ketua DPC PKB Lampung Barat, Khaidir Bujung Ketua DPC Tulang Bawang, pada tanggal 22 Desember 2015.

Penutup

Bab ini telah melakukan analisis terhadap pola hubungan antara pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu yang menjadi faktor pembeza Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah pada ideologi yang diusung. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak hanya menjalankan empat fungsi seperti yang disinggung Neumann tapi juga menjadi agen sosialisasi ideologis yang secara konsisten terus dilakukan. Ideologisasi ini yang hemat penulis menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbeza dengan partai lain. Di Lampung, khususnya Lampung Tengah dan Lampung Timur, proses ini bisa dilihat dalam berbagai cara; baik yang berupa penanaman nilai-nilai keagamaan, mahupun kegiatan lain yang bervisikan diseminasi nilai Islam yang terbuka, toleran dan peka terhadap keragaman.

Pesantren, pada gilirannya tetap menjadi kekuatan utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didasarkan atas asumsi yang bersifat sosiologis dan juga historis. Tentu saja keterlibatan pesantren dalam dunia politik bukanlah pengalaman baru. Karena sejarah telah mencatat bagaimana peran pesantren yang begitu besar terhadap bangsa Indonesia. Yang juga perlu dicatat adalah soal keterlibatan kyai dan pesantren dalam dunia politik adalah sesuatu yang sangat penting. Pengaruh kelompok ini cukup signifikan dalam masa perubahan sosial, terutama terhadap latar belakang perubahan tersebut.